

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) TAHUN 2024



**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MEMENENGAH
KABUPATEN CIREBON**

Jl. Sunan Drajat No 13 Kompleks Pemda Sumber

Telpon. (0231)321775

Email : diskop@cirbonkab.go.id

Sumber 45611

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayat dan petunjuk bagi kami, sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

LAKIP Dinas koperasi dan UKM Tahun 2024 ini disusun sebagai pertanggungjawaban yang berisi informasi kinerja dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) secara baik, akuntabel, efisien, responsive terhadap aspirasi yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mendapat kepercayaan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Dengan disusunnya LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dapat dilihat hasil kinerja selama 1 (satu) tahun untuk menjadi tolok ukur keberhasilan suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan KUMKM di Kabupaten Cirebon.

Semoga LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang untuk mengkaji dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan kinerja bidang Koperasi dan UMKM di Kabupaten Cirebon.

Sumber, 10 Februari 2025

KEPALA DINAS

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON,



Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670410 199301 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan.

Penilaian atas cacatan hasil reviu Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon memperoleh hasil Nilai Angka Evaluasi AKIP yakni **71,90** dengan kategori predikat **BB (Sangat Baik)**.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 dan analisa hasil capaian kinerja, maka diperoleh gambaran tentang pencapaian sasaran Strategis dari pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan public 92 Poin
- 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan 100 Prosen
- 3) Meningkatnya kualitas koperasi 50 Prosen
- 4) Meningkatnya kapasitas usaha dan produktivitas usaha mikro 12,44 Prosen
- 5) Meningkatnya Kemandirian, berdaya saing, kualitas produksi dan digitalisasi UMKM 10 Prosen
- 6) Terpenuhinya dukungan tata kelola perkantoran 90 Prosen

Berdasarkan permasalahan yang timbul dari berbagai pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2024 dapat dikelompokkan pada permasalahan sebagai berikut:

- 1) Lemahnya SDM dan Manajemen
- 2) Rendahnya legalitas dan kurangnya modal
- 3) Lemahnya pengolahan produksi dan pemasarannya masih sederhana, Pengemasan masih sederhana serta kurangnya inovasi.

- 4) Pengetahuan perkoperasian masih rendah
- 5) Banyaknya koperasi yang mati suri atau koperasi yang tidak aktif namun masih terdata sebagai koperasi aktif.

Dalam hal ini perlu dilakukannya langkah-langkah guna meminimalisir kendala-kendala yang ada agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat maksimal, diantaranya :

- 1) Adanya pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Ukm
- 2) Memfasilitasi legalisasi untuk para pelaku ukm
- 3) Memfasilitasi pemasaran dan e-katalog
- 4) Dilakukannya sosialisasi tentang perkoperasian untuk meningkatkan minat masyarakat dan pengusaha mikro untuk dapat bergabung dalam wadah koperasi.
- 5) Adanya pembinaan yang berkelanjutan untuk dapat mengaktifkan kembali kegiatan berkoperasi sebagai bentuk koperasi bagi anggotanya sehingga dapat bersaing dengan bentuk usaha lainnya.

Sumber, 10 Februari 2025

KEPALA DINAS

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON,



Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670410 199301 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi.....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	4
1.3. Isu-isu Strategis.....	8
1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....	10
1.5. Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2024 ex Post Tahun 2023.....	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	13
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	15
2.3. Struktur Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024.....	16
2.4. Perjanjian Kinerja 2024.....	20
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024.....	23
BAB III. AKUNTABILITAS.....	26
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	26
3.2. Capaian Kinerja Lainnya	40
3.3. Efisiensi Anggaran.....	42
3.4. Inovasi	43
3.5. Lintas Sektor.....	43
BAB IV. PENUTUP.....	44
4.1. Kesimpulan.....	44
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja.....	44
LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.4.1. Jumlah pegawai menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	8
Tabel 1.4.2. Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UKM.....	9
Tabel 1.4.3. Anggaran Belanja Daerah Dinas Koperasi dan UKM	10
Tabel 1.5.1. Tindak Lanjut atas LHE SAKIP 2023.....	10
Tabel 2.1.1. Sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM	13
Tabel 2.2.1. Strategis dan Arah Kebijakan.....	15
Tabel 2.3.1. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan.....	16
Tabel 2.4.1. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM.....	20
Tabel 2.4.1.1. Anggaran Program sebelum Perubahan 2024.....	21
Tabel 2.4.2. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Perubahan 2024.....	21
Tabel 2.4.1.1. Anggaran Program setelah Perubahan 2024.....	22
Tabel 3.1.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	26
Tabel 3.1.2. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	27
Tabel 3.1.2.1.1. Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan.....	27
Tabel 3.1.2.1.2. Target dan Realisasi Kinerja 2024.....	28
Tabel 3.1.2.1.3. Capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan Sasaran 1.....	28
Tabel 3.1.2.2.1. Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan.....	33
Tabel 3.1.2.2.2. Target dan Realisasi Kinerja 2024.....	33
Tabel 3.1.2.2.3. Capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan Sasaran 2.....	34
Tabel 3.1.2.3.1. Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan.....	36
Tabel 3.1.2.3.2. Target dan Realisasi Kinerja 2024.....	36
Tabel 3.1.2.3.3. Capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan Sasaran 3.....	37
Tabel 3.2.1. Capaian Kinerja SKPD terhadap Capaian Sasaran PEMDA.....	40
Tabel 3.3.1. Efisiensi Anggaran 2024.....	42

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1.1.1. Cascading Kinerja Dinas Koperasi dan UKM.....	2
Gambar 1.1.4.1. Struktur Organisasi.....	5
Gambar 1.2.2.1. Peta Jabatan	7
Gambar 2.5.1. SIMONEK.....	23
Gambar 2.5.2. E-Sakip.....	24
Gambar 2.5.3. E-Perencanaan.....	24
Gambar 2.5.4. SIPD.....	25
Gambar 2.5.5. E-Kinerja.....	25
Gambar 3.1.2.1.3.1. Sosialisasi dan Bimtek Tata Kelola Perkoperasian.....	30
Gambar 3.1.2.1.3.2. Pembukaan Hari Koperasi	30
Gambar 3.1.2.1.3.3. Rapat Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian...	31
Gambar 3.1.2.1.3.4. Kegiatan Kunjungan Kerja / Studi Tiru.....	32
Gambar 3.1.2.1.3.5. Kegiatan Kunjungan Kerja / Studi Tiru.....	32
Gambar 3.1.2.2.3.1. Pelatihan Kerwirausahaan.....	35
Gambar 3.1.2.2.3.2. Pelatihan Kerwirausahaan.....	35
Gambar 3.1.2.3.3.1. FGD Dinas Koperasi dan UKM.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden **Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI **nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Cirebon **Nomor 149 Tahun 2023** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

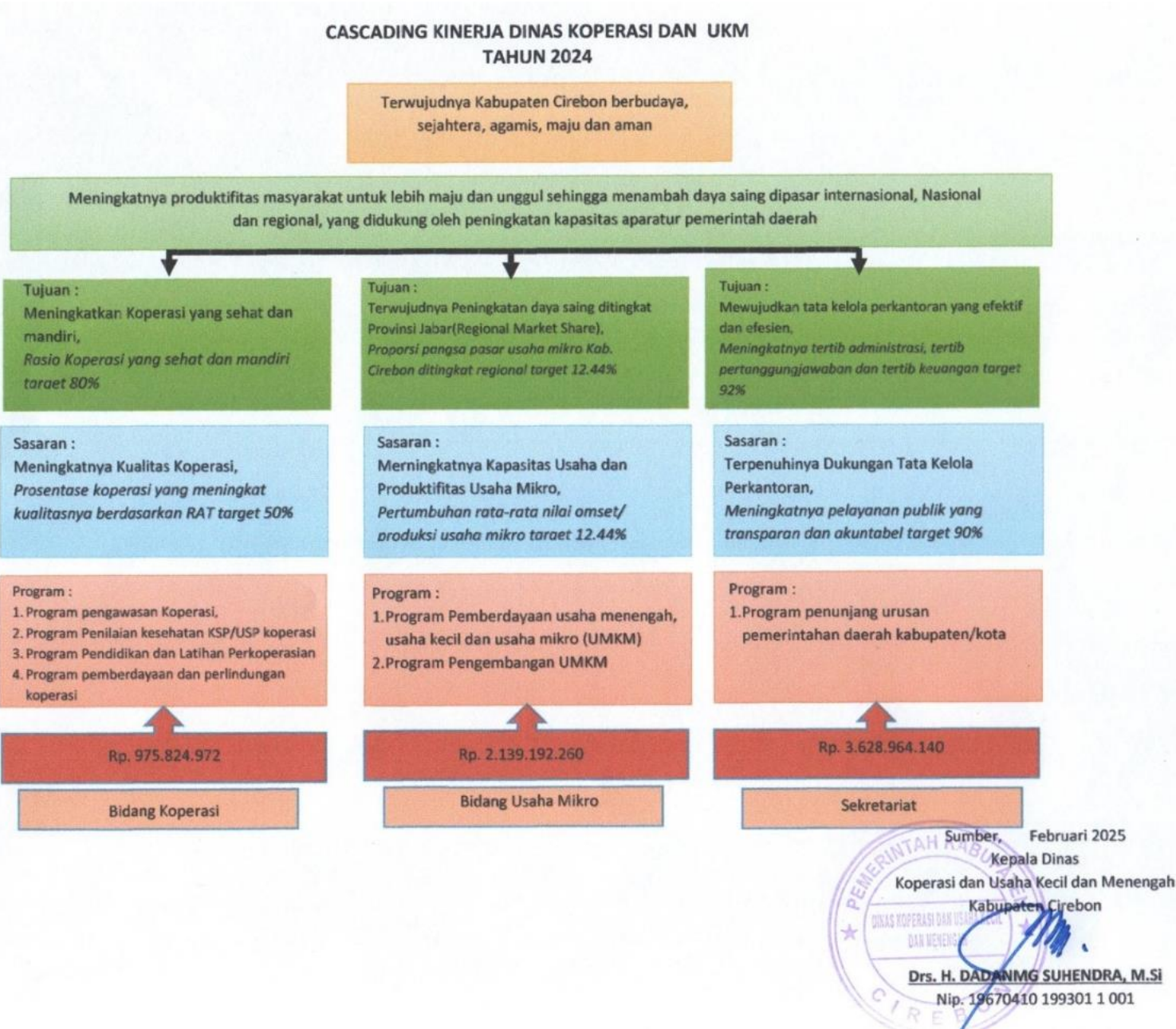
Tuntutan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) khususnya menyangkut kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kabupaten Cirebon harus didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pelayanan tepat guna/prima dan profesionalisme oleh aparat Diskopukm khususnya, agar hubungan dan mekanisme kerja antara Eksekutif dan Legislatif (DPRD) di Kabupaten Cirebon terjalin dengan harmonis dan selaras terbentuk hubungan (*check and balance*) yang lebih seimbang.

Disusunnya LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden **Nomor 29 tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

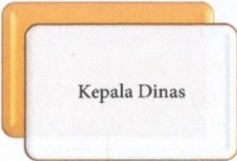
1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi

setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon **Nomor 7 Tahun 2019** Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 :

1.1.1. Cascading Kinerja 2024



1.1.2. Struktur Organisasi



1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kabupaten Cirebon merupakan dinas teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon **Nomor 149 Tahun 2023** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon **Nomor 149 Tahun 2023** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, bahwa setiap jabatan struktural pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon mempunyai tugas umum sesuai dengan ruang lingkup dinas / sekretariat / bidang / subbagian / seksi / kelompok jabatan fungsional, meliputi:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasi, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sedangkan untuk fungsinya antara lain :

- a. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
- c. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi

2. Sekretaris

Mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengkoordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Sedangkan untuk fungsinya antara lain:

- a. Koordinasi antar kegiatan,

- b. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian. Sedangkan untuk fungsinya antara lain :

 - a. Pengamanan sarana dan prasarana kantor
 - b. Pelaksanaan penjagaan kebersihan Lingkungan kantor
 - c. Pelaksanaan pengadaan pemeliharaan dan rehabilitasisarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional.
- 4. Kasubag Program dan Keuangan

Merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan, kegiatan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset. Sedangkan untuk fungsinya antara lain :

 - a. Menyiapkan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
 - b. Penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi
 - c. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan, sub kegiatan
- 5. Kepala Bidang koperasi

Merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan kelembagaan koperasi, pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan koperasi. Sedangkan untuk fungsinya antara lain :

 - a. Perumusan bahan perencanaan pada bidang koperasi,
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi,
 - c. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi.
- 6. Kepala Bidang Usaha Mikro

Merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan Usaha Mikro. Sedangkan untuk fungsinya antara lain :

 - a. Perumusan bahan perencanaan pada bidang usaha mikro,
 - b. Perumusan kebijakan teknnis di bidang usaha mikro,

c. Pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro.

7. Pengawas Koperasi Ahli Muda/Pertama

Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi. Sedangkan untuk fungsinya antara lain :

- a. Menelaah rencana kerja tahunan pengawas koperasi
- b. Melakukan penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan koperasi
- c. Melakukan analisis data objek pengawasan koperasi;

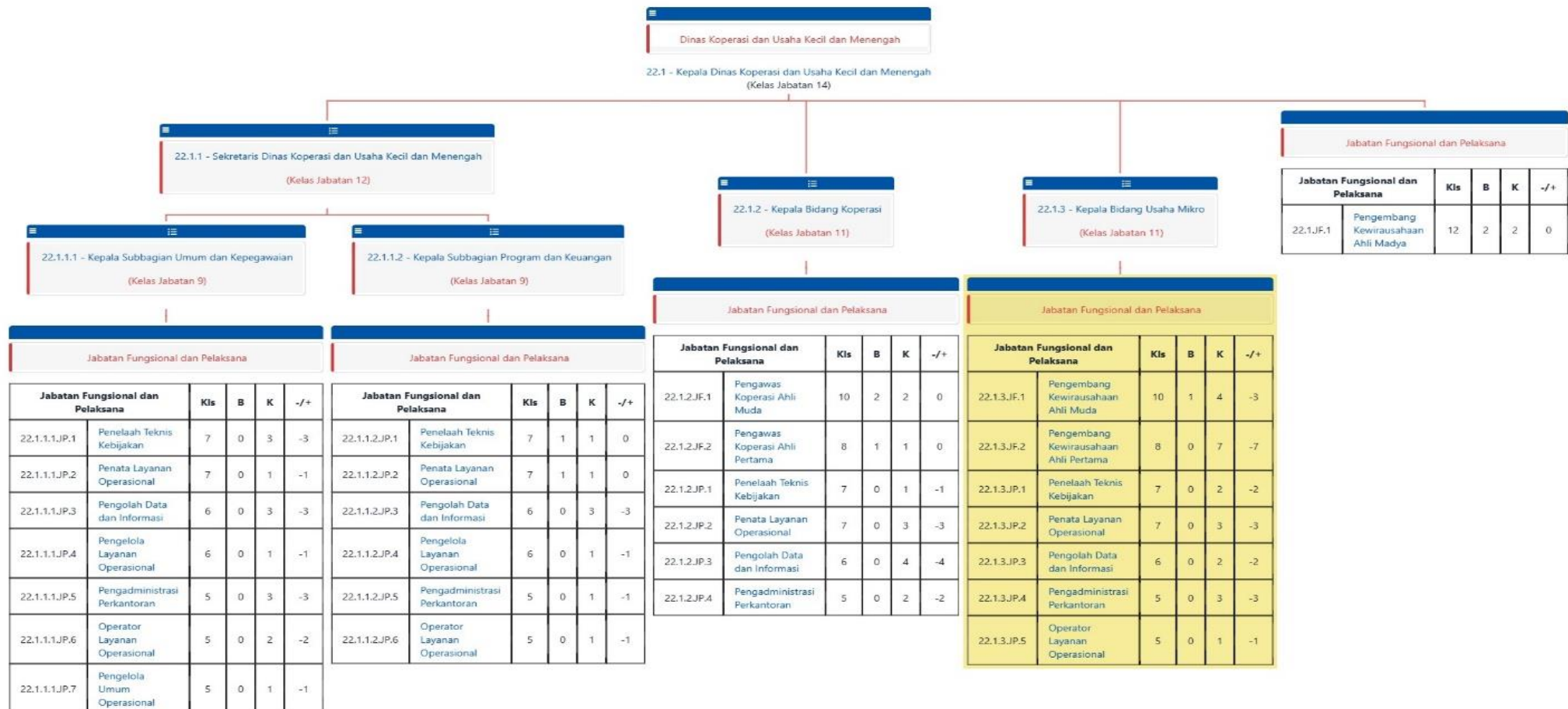
8. Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda

Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan kewirausahaan. Sedangkan untuk fungsinya antara lain :

- a. Menyempurnakan konsep pemetaan potensi kewirausahaan berdasarkan hasil uji,
- b. Menyusun konsep rumusan kebijakan mengenai pemetaan potensi kewirausahaan,
- c. Menyusun data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam satu wilayah kerja provinsi untuk pemetaan potensi kewirausahaan

1.2.2 Peta Jabatan

Gambar 1.2.2.1. Peta Jabatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Mengah



1.3 Isu-isu Strategis

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun internal Instansi. Isu strategis yang melingkupi Dinas Koperasidan Usaha dan Menengah Kabupaten Cirebon antara lain sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas dan daya saing produk UKM terhadap perkembangan tren pasar, baik untuk pangsa dalam negeri ataupunluar negeri.
- 2. Mendesak penyelesaian terhadap koperasi-koperasi bermasalah dan penguatan SDM perkoperasian.
- 3. Penguatan UMKM dengan Teknologi informasi dalam pengembangan UMKM.

1.4 Dukungan SDM, Sarana prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4.1. Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Tahun 2024

No	Jabatan	Formasi					Pegawai Yang Ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				L	P
			S3	S2	S1	SMA		S3	S2	S1	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi												
	1. JPT Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. JPT Pratama	1	-	1	-	-	1		1		-	1	-
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	3	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	2. Pengawas	2	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	1
	3. Pelaksana	29	-	-	27	2	2	-	-	-	2	2	-
C.	Jabatan Fungsional	14	1	1	12	-	6	1	1	4	-	4	2
	Jumlah	49	1	5	41	2	11	1	2	6	2	7	4

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon 2024

Berdasarkan pada tabel 1.4.1, tingkat pendidikan SDM pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 6 (enam) orang atau 54,55%, disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 (dua) orang atau 18,18%, SMA sebanyak 2 (dua) orang atau 18,18% dan pendidikan dengan jumlah paling sedikit ialah S3 sebanyak 1 (satu) orang atau 9,09%.

Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan, yakni 7 (tujuh) orang untuk jumlah pegawai laki-laki atau 63,64%, sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 4 (empat) orang atau 36,36%.

Meski demikian, dalam hal jumlah pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon memiliki kekurangan pegawai cukup jauh jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah kompetensi yang dibutuhkan yakni sebanyak 38 pegawai, diantaranya administrator membutuhkan 2 pegawai, pengawas 1 pegawai, pelaksana 27 pegawai, dan untuk jabatan fungsional sebanyak 8 pegawai.

Tabel 1.4.2. Sarana dan Prasarana Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kode Barang	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1.1	Aset Lancar	0	0,00
1.1.7.	Persediaan	0	0,00
1.3	Aset Tetap	415	9.415.509.767,00
1.3.1	Tanah	4	6.205.225.000,00
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	339	2.065.692.745,33
1.3.3	Gedung dan Bangunan	10	3.134.222.098,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	2	288.570.000,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	0	(2.278.200.076,33)
1.5	Aset Lainnya	4	5.973.000,00
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	3	129.120.000,00
1.5.4	Aset Lain-lain	1	2.864.000,00
1.5.5	Akumulasi Amortisasi Tidak Berwujud	0	(123.147.000,00)
1.5.6	Akumulasi Penyusutan aset Lainnya	0	(2.864.000,00)

Sumber : Neraca T.A. 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kab.Cirebon

Kendaraan Dinas terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat, kebutuhan ruang kantor umum relatif sudah tersedia meliputi, ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang musholah, ruang gedung, ruang tunggu, ruang gudang dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filing cabinet, pendingin ruangan, roll opack dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik.

**Tabel 1.4.3. Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

Kode Rek	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah perubahan	Bertambah/ Berkurang
	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-
	Retribusi Daerah	-	-	-
5.	BELANJA DAERAH	6.842.920.572	6.897.236.572	54.316.000
5.1.	BELANJA OPERASI	6.580.631.232	6.606.219.232	25.588.000
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.900.084.000	2.754.400.000	(145.684.000)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.680.547.232	3.851.819.232	
	Dst.			
5.2.	BELANJA MODAL	262.289.340	291.017.340	28.728.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.289.340	291.017.340	28.728.000
	Dst.			

Sumber : Data LRA Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fingsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon berasal dari APBD Kbaupaten Cirebon dan Dana Anggaran Khusus (DAK).

Terlihat pada tabel 1.4.3. bahwa untuk tahun 2024 bahwa anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kbaupaten Cirebon yang semula berjumlah Rp.6.824.920.572 dan setelah mengalami perubahan menjadi Rp.6.897.236.572 atau bertambah sebesar Rp.54.316.000 perubahan anggaran tahun 2024 merupakan bagian dari dukungan yang diberikan untuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon dalam pengoptimalan program kegiatan dan sub kegiatan.

1.5 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2024 ex post Tahun 2023

Tabel 1.5.1. Tindak Lanjut LHE SAKIP 2023

No	Rekomendasi Temuan	Tindaklanjut OPD
1	Membuat Laporan Review Renstra secara berkala per Triwulan	Dinas koperasi telah menindaklanjuti rekomendasi hasil lakip sebanyak 8 poin yang keseluruhannya telah ditinjau dan ditindaklanjuti
2	Membuat Notulen Rapat yang dipimpin dan ditanda tangani oleh Kepsala Di	
3	Membuat SOP pengumpulan data Kinerja	
4	Melampirkan dokumen penempatan/ penghapusan Jabatan baik Struktural maupun Fungsional berdasarkan pengukuran capaian kinerja	
5	Me;emhkapai Laporan Kinerja dengan menyajikan Informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	

6	Dokumen Laporan Kinerja agar menyajikan data perbandingan realisasi Kinerja dengan realisasi kinerja level nasional/provinsi (benchmark kinerja)	beserta eviden-evidennya.
7	Melengkapi dengan hasil rapat/ notulen atas pencapaian kinerja yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas	
8	Agar membuat notulen/ Laporan Hasil Evaluasi Internal LKIP	

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Program Pemerintah Daerah (Properda) Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, yaitu: ***“Terwujudnya kabupaten cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman”***(BERSAMA).

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Kabupaten Cirebon BERBUDAYA
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi dan adat
2. Kabupaten Cirebon SEJAHTERA
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhandasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi
3. Kabupaten Cirebon AGAMIS
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika
4. Kabupaten Cirebon MAJU
Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
5. Kabupaten Cirebon AMAN
Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Pembinaan terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah tercakup pada **Misi ke 4 Pemerintah Kabupaten Cirebon**, yaitu Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Cirebon tersebut, maka pembangunan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Cirebon, dilaksanakan berdasarkan

Visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yaitu: **“Mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Penggerak Perekonomian Daerah, Berdaya Saing, Berkualitas, dan Berkeadilan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**.

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 2. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 3. Meningkatkan Akses Pembiayaan, Teknologi, Pemasaran, dan Jaringan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 4. Mendorong Kemandirian dan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5. Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1.1. Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Cirebon Tahun 2024.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru	Meningkatkan kualitas daya saing KUMKM	Orang, Prosen	500 orang	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM	Prosen	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi	Prosen	89.02	90	91	92	93	93
3.	Meningkatnya	Indeks Kepuasan	poin	84	86	88	90	92	92

	kualitas pelayanan publik	Masyarakat							
4.	Meningkatnya kualitas koperasi	prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	Prosen	-	40	40	45	50	50
5.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro	Prosen	-	12.44	12.44	12.44	12.44	12.44
6.	Meningkatkan Kemandirian,Ber daya saing, Kualitas Produksi dan Digitalisasi UMKM	Pertumbuhan rata-rata nilai omset atau nilai produksi Usaha Mikro	Prosen	-	7	7	10	10	10
7.	Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel	Prosen	-	90	90	90	90	90

Pada Tabel diatas menjelaskan bahwa :

1. Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru, dengan **indikator kinerja** Meningkatkan kualitas daya saing KUMKM pada tahun 2020 memiliki target 500 orang, namun untuk ditahun 2021 hingga tahun 2024 memiliki target 100%.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan **indikator kinerja** Meningkatnya sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM pada tahun 2020 hingga tahun 2024 memiliki target yang relatif sama yakni 100%. dan **indikator kinerja** Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi pada tahun 2020 memiliki target 89.02%, tahun 2021 target 90%, tahun 2022 target 91%, tahun 2023 target 92% dan tahun 2024 target 93%.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan **indikator kinerja** Indeks Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2020 memiliki target 84 poin, 2021 memiliki target 86 poin, tahun 2022 memiliki target 88, tahun 2023 memiliki target 90 poin dan tahun 2024 memiliki target 92 poin.
4. Meningkatnya kualitas koperasi dengan **indikator kinerja** prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %) pada tahun 2020 dan 2021 memiliki target 40%, tahun 2023 memiliki target 45R dan tahun 2024 memiliki target 50%.
5. Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro dengan

- indikator kinerja** Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro pada tahun 2021 hingga tahun 2024 memiliki target yang relatif sama yakni 12.44%.
6. Meningkatkan Kemandirian, Berdaya saing, Kualitas Produksi dan Digitalisasi UMKM dengan **indikator kinerja** Pertumbuhan rata-rata nilai omset atau nilai produksi Usaha Mikro pada tahun 2021 hingga tahun 2022 memiliki target yang sama yakni 7%, sedangkan untuk tahun 2023 dan 2024 memiliki target yang sama yakni 10%.
7. Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran dengan indikator kinerja Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel pada tahun 2021 hingga tahun 2024 memiliki target yang relatif sama yakni 90%.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.1. Strategi dan arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDANYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN			
MISI 1 :	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan angka pengangguran	Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru	Menurunkan angka pengangguran	Menurunkan angka pengangguran
MISI 2:	Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah		
Tujuan	sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnkan pertumbuhan ekonmi sektor unggulan yang inklusif dan berkeadilan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
Meningkatnya koperasi yang sehat dan mandiri	Meningkatnya kualitas koperasi	Prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan omzet dan anggota 5%)	Meningkatnya kualitas koperasi beerdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan omzet dan anggota 5%)
Terwujudnya peningkatan Daya Saing di tingkat Provinsi Jawa Barat (Regional Market Share)	Meningkatnya kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan rata-rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro	Meningkatnya Pertumbuhan rata-rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro

2.3 Struktur Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

Tabel 2.3.1. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Terpenuhinya dukungan tata kelola perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,	3.628.648.140	3.682.964.140	54.316.000
		1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.604.700	69.604.700	-
		▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.463.200	50.463.200	-
		▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.328.500	7.328.500	-
		▪ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.927.000	9.927.000	-
		▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.886.000	1.886.000	-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.951.346.900	2.805.662.900	(145.684.000)
		▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.900.084.000	2.754.400.000	(145.684.000)
		▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	44.149.000	44.149.000	-
		▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	7.113.900	7.113.900	-
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah,	368.250.400	368.250.400	-
		▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penetrangan Bangunan Kantor	8.670.000	8.670.000	-
		▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.995.000	79.995.000	-
		▪ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.386.800	2.386.800	-

		▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.091.500	20.091.500	-
		▪ Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	50.244.000	50.244.000	-
		▪ Penyediaan Bahan/Material	95.349.100	95.349.100	-
		▪ Fasilitas Kunjungan Tamu	16.000.000	16.000.000	-
		▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.514.000	95.514.000	-
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,	79.420.340	79.420.340	-
		▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.691.340	47.691.340	-
		▪ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.729.000	31.729.000	-
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,.	99.999.100	99.999.100	-
		▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.	99.999.100	99.999.100	-
		6. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.026.700	260.026.700	200.000.000
		▪ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Knator atau Bangunan Lainnya	60.026.700	260.026.700	200.000.000
2	Meningkatnya kualitas koperasi	1. Program Pengawasan dan Pemerikdaan Koperasi	16.781.900	16.781.900	-
		a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	16.781.900	16.781.900	-

		▪ Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	16.781.900	16.781.900	-
		2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi,	173.086.616	173.086.616	-
		a. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota,	173.086.616	173.086.616	-
		▪ Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	173.086.616	173.086.616	-
		3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,	415.721.004	647.746.604	232.025.600
		a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota,	415.721.004	647.746.604	232.025.600
		▪ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	415.721.004	647.746.604	232.025.600
		4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	138.209.852	138.209.852	-
		a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/kota,	138.209.852	138.209.852	-
		▪ Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	138.209.852	138.209.852	-

		Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
3	Meningkatnya kapasitas usaha dan produktivitas usaha mikro	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro(UMKM),	370.953.660	482.104.460	111.150.800
		a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi,	370.953.660	482.104.460	111.150.800
		▪ Pemberdayaan melalui Kwmitraan Usaha Mikro	156.532.900	156.532.900	-
		▪ Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	28.319.300	28.319.300	-
		▪ Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	45.052.300	156.203.100	111.150.800
		▪ Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	44.002.300	44.002.300	-
		▪ Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	95.046.860	95.046.860	-
		2. Program Pengembangan UMKM,	871.340.000	1.756.343.000	885.003.000
		a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil,	871.340.000	1.756.343.000	885.003.000
		▪ Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	871.340.000	1.756.343.000	885.003.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan dan Dokumen Perubahan Anggaran Dinas Koperasi Tahun 2024

2.4 Perjanjian Kinerja 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cirebon

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya kualitas koperasi	prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	Prosen	50	Triwulan I	50
					Triwulan II	50
					Triwulan III	50
					Triwulan IV	50
2.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro	Prosen	12.44	Triwulan I	12.44
					Triwulan II	12.44
					Triwulan III	12.44
					Triwulan IV	12.44
3.	Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel	Prosen	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90

Penjelasan pada tabel 2.4.1. sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Koperasi dengan indikator kinerja prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)
2. Sasaran strategis Meningkatkan Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro dengan indikator kinerja Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro
3. Sasaran Strategi Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran dengan indikator kinerja Meningkatkan Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.4.1.1. Anggaran Program Sebelum Perubahan 2024

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusuan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,	Rp. 3.628.648.140
.	Program Pengsawasan dan Pemerikdaan Koperasi (APBD)	Rp. 16.781.900
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, (APBD)	Rp. 173.086.616
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,(APBD)	Rp. 415.721.004
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (APBD)	Rp. 138.209.852
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro(UMKM), (APBD)	Rp. 370.953.660
7.	Program Pengembangan UMKM,, (APBD)	Rp. 871.340.000

Penjelasan dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk anggaran Program bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon diantaranya Program Penunjang Urusuan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp.3.628.648.140, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan total anggaran Rp.415.721.004 Program Pengsawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan anggaran Rp.16.781.900, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan anggaran Rp.173.086.616, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran Rp.138.209.852. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro(UMKM), dengan anggaran Rp. 370.953.660, dan Program Pengembangan UMKM dengan anggaran Rp. 871.340.000.

Tabel 2.4.2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cirebon

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya kualitas koperasi	prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	Prosen	50	Triwulan I	50
					Triwulan II	50
					Triwulan III	50
					Triwulan IV	50
2.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro	Prosen	12.44	Triwulan I	12.44
					Triwulan II	12.44
					Triwulan III	12.44
					Triwulan IV	12.44

3.	Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel	Prosen	90	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	90 90 90 90
----	---	---	--------	----	--	----------------------

Penjelasan pada tabel 2.4.2. sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Koperasi dengan indikator kinerja prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (ti ga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)
2. Sasaran strategis Meningkatkan Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro dengan indikator kinerja Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro
3. Sasaran Strategi Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran dengan indikator kinerja Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

.

Tabel 2.4.2.1. Anggaran Program Setelah Perubahan 2024

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusuan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (APBD)	Rp. 3.682.964.140
.	Program Pengsawasan dan Pemerikdaan Koperasi (APBD)	Rp. 16.781.900
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, (APBD)	Rp. 173.086.616
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,(APBD, DAK)	Rp. 647.746.604
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (APBD)	Rp. 138.209.852
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro(UMKM), (APBD, DAK)	Rp. 482.104.460
7.	Program Pengembangan UMKM,, (APBD, DBH CHT, DAK)	Rp. 1.756.343.000

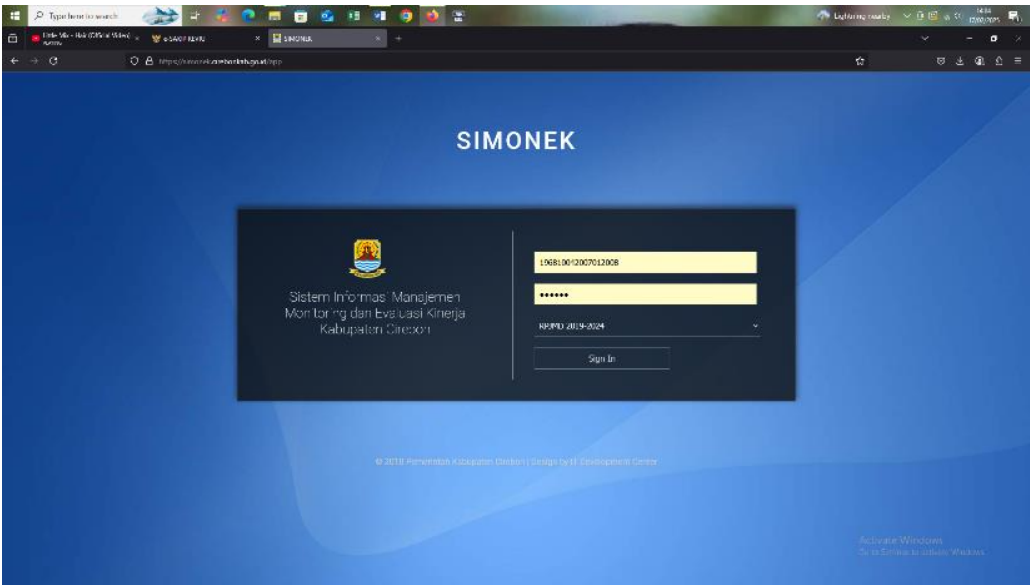
Penjelasan dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk anggaran Program memiliki perubahan diantaranya tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon melainkan ada dana tambahan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun DBH CHT, diantaranya Program Penunjang Urusuan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (APBD) mengalami perubahan anggaran yakni menjadi Rp. 3.682.964.140. Program Pengsawasan dan Pemerikdaan Koperasi (APBD) memiliki anggaran sebesar Rp. 16.781.900, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, (APBD) memiliki anggaran sebesar Rp. 173.086.616, untuk Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,(APBD,

DAK) memiliki perubahan anggaran menjadi Rp. 647.746.604, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (APBD) memiliki anggran Rp. 138.209.852, untuk Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro(UMKM), (APBD, DAK) mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 482.104.460, dan untuk Program Pengembangan UMKM,, (APBD, DBH CHT, DAK) mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.756.343.000.

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024

Instrumen pendukung penerapan Sistem dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah melalui aplikasi **Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Cirebon (SIMONEK)**, **Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (E-SAKIP)**, **E-Perencanaan**, **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)** dan **E-Kinerja** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

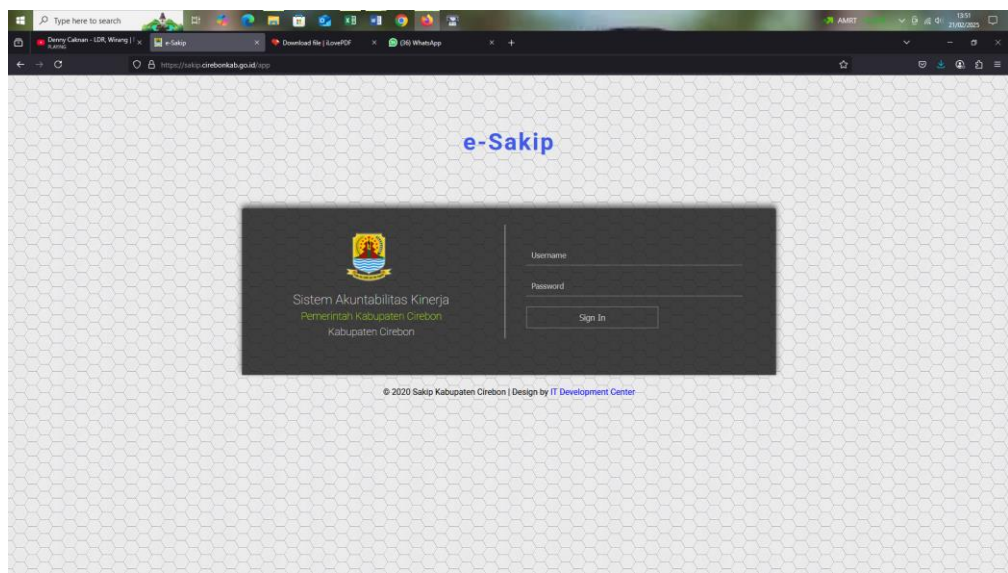
Gambar 2.5.1 SIMONEK



Sumber : <https://simonek.cirebonkab.go.id/>

Intrumen pendukung penerapan *Sistem Informasi Manajemen, Monitoring dan Evaluasi Kinerja* (SIMONEK) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah aplikasi yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD

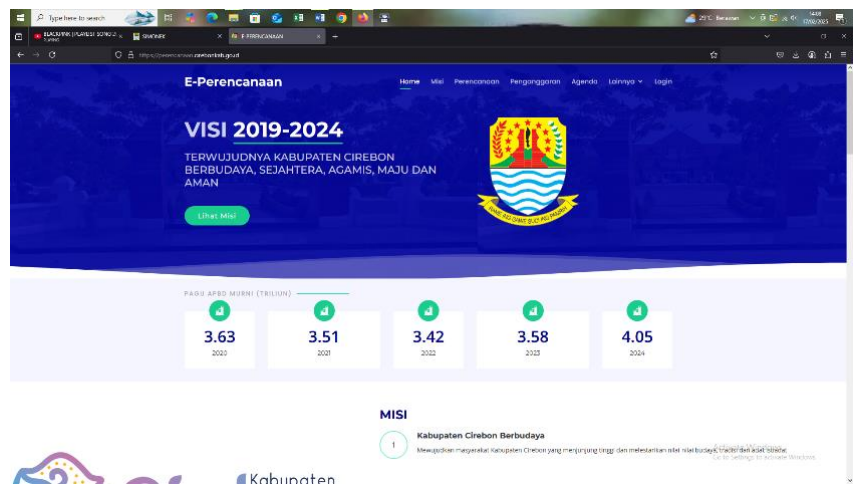
Gambar 2.5.2 E-Sakip



Sistem : <https://sakip.cirebonkab.go.id/>

Intrumen pendukung penerapan *Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah* (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah aplikasi yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, Anggaran kas, Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

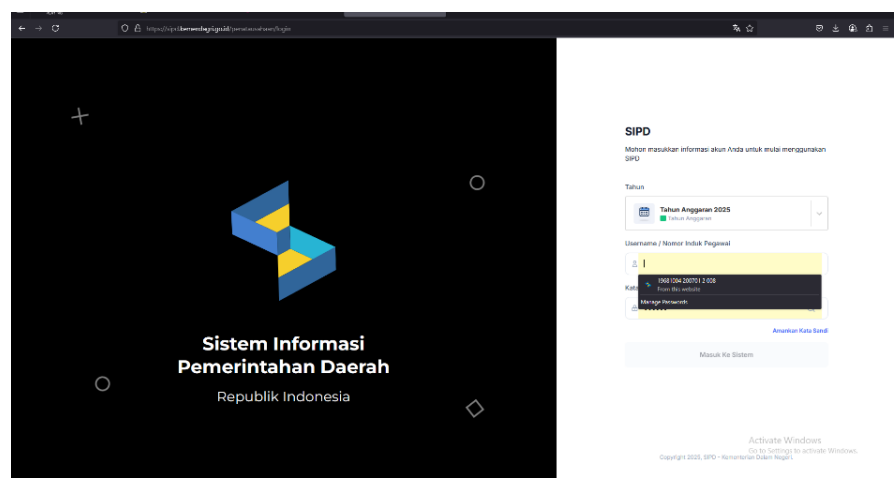
Gambar 2.5.3 E-Perencanaan



Sistem : <https://perencanaan.cirebonkab.go.id/>

Intrumen pendukung penerapan *Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah/ E-Perencanaan* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah aplikasi yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, Anggaran kas, Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

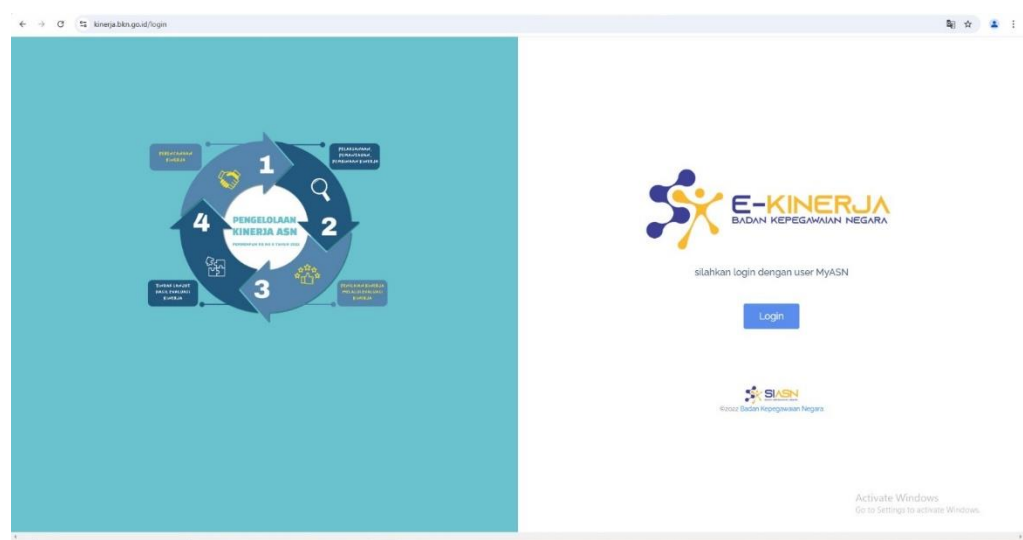
Gambar 2.5.4 SIPD



Sistem : <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/login>

Intrumen pendukung penerapan *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah aplikasi yang menyediakan data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan akurat.

Gambar 2.5.5 E-Kinerja



Sumber : <https://kinerja.bkn.go.id/login>

Intrumen pendukung capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon lainnya yaitu aplikasi E-Kinerja yang merupakan sistem untuk mengisi kegiatan dan kinerja pegawai dan sasaran pegawai negeri sipil (PNS).

BAB III
AKUNTABILITAS

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon tahun 2024.

Pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Skala Nilai peringkat Kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91≤100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76≤90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66≤75	Sedang	Kuning Tua
4.	51≤65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Presentase capaian kinerja dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian yang semakin baik.

Perhitungan persentase capaian kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi yakni semakintinggi realisasi menunjuk pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Capaian kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari suatu kegiatan dan sasaran strategis yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024				Target Akhir
						Target	Realisasi	%	Kriteria /Kode	
1.	Meningkatnya kualitas koperasi	prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	Prosen	45	50	50	50	100	Sangat Baik	50
2.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro	Prosen	12.44	12.44	12.44	12.44	100	Sangat Baik	12.44
3.	Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel	Prosen	90	90	90	90	100	Sangat Baik	90

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.1.2.1.Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas koperasi

Kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas koperasi yang sesuai kebutuhan dan kemampuan diukur dengan indikator dan meta indikator adalah;ah sebagai beriuat :

Tabel 3.1.2.1.1 Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1.	Meningkatnya kualitas koperasi	prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	Jumlah koperasi yang melakukan RAT / Jumlah koperasi yang aktif di kali 100%

Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas koperasi diukur dengan menggunakan meta indikator rata-rata prosentase meningkatnya kualitas koperasi yakni dengan Jumlah koperasi yang melakukan RAT / Jumlah koperasi yang aktif di x 100%.

Tabel 3.1.2.1.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir
				Target	Realisasi	%	
1.	prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	Prosen	50	50	50	100	50

Analisis ketercapaian sasaran 1 : meningkatnya kualitas koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi 50% dengan demikian prosentase capaian target sebesar 100% (tercapai)
- b. Pada sasaran meningkatnya kualitas koperasi Tahun 2023 dan 2024 dengan indikator prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %) memiliki realisasi yang sama besar yakni sebesar 50%.
- c. Target akhir dengan target tahun 2024 memiliki target yang sama besar yakni 50%.

Tabel 3.1.2.1.3. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	40	40	100
	a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota				
	❖ Penguatan Tata Kelola Kelembagaan	Jumlah Koperasi yang dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	100

	Koperasi				
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi,		1. Prosentase koperasi sehat 2. Persentase koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20 19	20 19	100 100
	a. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota,				
	❖ Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	100
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		1. Prosentase pengurus, pengawas, manajer dan pengelola koperasi yang bersertifikat kompetensi 2. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian	40 60	40 60	100 100
	a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	❖ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	200 Orang	200 Orang	100
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		1. Laju perkembangan usaha produktif koperasi 2. Meningkatnya produktifitas koperasi	40 1.37	40 1.37	100 100
	a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/kota,				
	❖ Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	100

Capaian tersebut didukung dari :

a. Capaian Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Indikator Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yaitu Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota target capaian indikator ini pada tahun 2024 yaitu sebesar 40% dengan realisasi 40% atau

capaiannya 100%.

Gambar 3.1.2.1.3.1. Sosialisasi dan Bimtek Tata Kelola perkoperasian



Sumber : Kegiatan Bidang Koperasi penyusunan laporan RAT pada tanggal 18 September 2024.

b. Capaian Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Indikator Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi memiliki dua indikator yakni Prosentase koperasi sehat dan Persentase koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. Untuk capaian indikator Prosentase koperasi sehat memiliki target caopaian 20% dengan realisasi 20% dan capaian kinerjanya 100%. Sedangkan untuk capaian target indikator ke dua Persentase koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota memiliki target capaian 19% dengan realisasi 19% dan capaian kinerjanya 100%.

Gambar 3.1.2.1.3.2. Pembukaan Hari Koperasi tanggal 16 Juli 2024



Sumber : Kegiatan Bidang Koperasi Tahun 2024

c. Capaian Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Indikator Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memiliki dua indikator yakni Prosentase pengurus, pengawas, manajer dan pengelola koperasi yang bersertifikat kompetensi dan Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian. Untuk capaian target indikator pertama Prosentase pengurus, pengawas, manajer dan pengelola koperasi yang bersertifikat kompetensi memiliki target capaian 40% dengan realisasi 40% dan memiliki capaian kinerja 100%. Sedangkan untuk capaian terget capaian untuk indikator yang kedua yakni Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian 60% dengan realisasi 60% dan memiliki capaian kinerja 100%.

Gambar 3.1.2.1.3.3. Rapat Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi



Sumber : kegiatan Bidang Koperasi di Hotel Sapadia Cirebon

d. Capaian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Indikator Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi memiliki dua indikator yakni Laju perkembangan usaha produktif koperasi dan Meningkatnya produktifitas koperasi. Untuk capaian target pada indikator pertama yakni Laju perkembangan usaha produktif koperasi memiliki target 40% dengan realisasi 40% dan memiliki capaian kinerja 100%. Untuk indikator ke dua yakni Meningkatnya produktifitas koperasi memiliki target 1.37% dengan realisasi 1.37% dan memeiliki capaian kinerja 100%.

Gambar 3.1.2.1.3.4. Kegiatan kunjungan kerja / studi tiru



Sumber : kegiatan Bidang Koperasi di Dinas Koperasi dan UKM dan Perindustrian Kota Surakarta

Gambar 3.1.2.1.3.5. Kegiatan kunjungan kerja / studi tiru



Sumber : Kegiatan Bidang Koperasi di Dinas Koperasi dan UKM dan Perindustrian Kota Surakarta

Faktor pendukung keberhasilan

1. Sudah memiliki forum koperasi kabupaten dan terhimpun dalam Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Kabupaten Cirebon.
2. Pola Pikir yang terbuka dari unsur pengurus koperasi terkait aturan baru

Faktor Penghambat keberhasilan

1. Akses wilayah yang sangat besar
2. Jumlah Pegawai Dinas yang sangat minim
3. SDM Pengurus koperasi masih banyak yang belum memahami perkoperasian
4. Belum diterima nya sosialisasi aturan baru terkait perkoperasian oleh koperasi dengan baik

3.1.2.2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro

Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro yang sesuai kebutuhan dan kemampuan diukur dengan indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.2.1. Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang terdapat di galeri caruban / Jumlah total UMKM yang ada x 100%.

Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro diukur dengan menggunakan meta indikator rata-rata Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro yakni dengan Jumlah UMKM yang terdapat di galeri caruban / Jumlah total UMKM yang ada x 100%.

Tabel 3.1.2.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir
				Target	Realisasi	%	
1.	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro	Prosen	12.44	12.44	12.44	100	12.44

Analisis ketercapaian sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi 12.44% dengan demikian prosentase capaian target sebesar 100% (tercapai)
- b. Pada sasaran Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas

Usaha Mikro Tahun 2023 dan 2024 dengan indikator Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro memiliki realisasi yang sama besar yakni sebesar 12.44%.

- c. Target akhir dengan target tahun 2024 memiliki target yang sama besar yakni 12.44%.

Tabel 3.1.2.2.3. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM),	1. Prosentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha		5	5	100
	2. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		5	5	100
	a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi				
	❖ Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	100
	❖ Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	100
	❖ Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	100
	❖ Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	150 Orang	100
	❖ Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1.000 Unit Usaha	1.000 Unit Usaha	100
2. Program Pengembangan UMKM,	Persentase usaha mikro yang berkembang nilai omsetnya		1.50	1.50	100
	a. engembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil,				
	❖ Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1.100 Unit Usaha	1.100 Unit Usaha	100

Capaian tersebut didukung dari :

a. Capaian Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) memiliki dua indikator kinerja yakni Prosentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha dan Rasio pertumbuhan wirausaha baru

yang berskala mikro. Untuk indikator yang pertama yakni Prosentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha memiliki target 5% dengan realisasi 5% dan capaian kinerja 100%. Dan untuk indikator yang kedua yakni Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro memiliki target 5% dengan realisasi 5% dan capaian kinerja 100%.

Gambar 3.1.2.2.3.1. Pelatihan Kewirausahaan (Pelatihan e-commerce)



Sumber : Bidang Usaha Mikro Kegiatan di Kecamatan Karangwareng

b. Capaian Program Pengembangan UMKM,

Indikator Capaian Program Pengembangan UMKM dengan indikator kinerja Persentase usaha mikro yang berkembang nilai omsetnya memiliki target 1.50% dengan realisasi 1.50% dan capaian kinerja 100%

Gambar 3.1.2.2.3.2. Pelatihan Kewirausahaan (Pelatihan e-commerce)



Sumber : Bidang Usaha Mikro Kegiatan di Kecamatan Plumbon

Faktor pendukung keberhasilan

- a. Adanya Konsultasi BDS yang memfasilitasi legalisasi dan digitalisasi
- b. Meiliki gedung BDS tersendiri yang berada di jalan cipto mangunkusumo – Kota Cirebon
- c. Adanya display produk UKM di galeri Crauban

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Lemahnya sdm UMKM
- b. Kurangnya inovasi produk
- c. Pemasaran dan kemasan produk yang masih sederhana
- d. Kurangnya modal

3.1.2.3. Sasaran 3 : Terpenuhihinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran

Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro yang sesuai kebutuhan dan kemampuan diukur dengan indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.3.1. Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1.	Terpenuhihinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel	Jumlah dukungan tata kelola yang dilaksanakan / jumlah target dukungan tata kelola yang berlaku x 100%

Kinerja Sasaran Terpenuhihinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran diukur dengan menggunakan meta indikator Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel Jumlah dukungan tata kelola yang dilaksanakan / jumlah target dukungan tata kelola yang berlaku x 100%.

Tabel 3.1.2.3.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel	Prosen	90	90	90	100	90

Analisis ketercapaian sasaran 3 : Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi 90% dengan demikian prosentase capaian target sebesar 100% (tercapai)
- b. Pada sasaran Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro Tahun 2023 dan 2024 dengan indikator Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel memiliki realisasi yang sama besar yakni sebesar 90%.
- c. Target akhir dengan target tahun 2024 memiliki target yang sama besar yakni 90%.

Tabel 3.1.2.3.3. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3

Progra m	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1.Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100	100	100
		2.Prosentase Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	87	87	100
	a.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100
	❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100
	❖ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100
	❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap.	4 Lap.	100
	b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	11 orang	61.11
	❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	1 Lap.	100
	❖ oordinasi dan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 Lap.	2 Lap.	100

	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	3.Administrasi Umum Perangkat Daerah,				
	❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100
	❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100
	❖ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100
	❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100
	❖ Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dok	3 Dok	100
	❖ Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	1 Paket	1 Paket	100
	❖ Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap.	1 Lap.	100
	❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Lap	50 Lap	100
	4.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,				
	❖ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	100
	❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	10 Unit	100
	5.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,.				
	❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Lap	3 Lap	100
	6.Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan				
	❖ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100

Capaian tersebut didukung dari :

a. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki dua indikator kinerja yakni Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif

dan Prosentase Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima. Untuk indikator yang pertama yakni Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif memiliki target 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%. Dan untuk indikator yang kedua yakni Prosentase Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima memiliki target 87% dengan realisasi 87% dan capaian kinerja 100%.

Gambar 3.1.2.3.3.1. FGD Dinas Koperasi dan UKM



Sumber : Kegiatan FGD Dinas Koperasi dan UKM

Faktor Pendukung Keberhasilan

- a. Telah dilakukannya sosialisasi terkait penyusunan analisis jabatan dan perhitungan beban kerja yang disesuaikan dengan jumlah pegawai
- b. Keahlian pegawai yang dimiliki mampu mengelola keuangan dan menyusun program kegiatan perencanaan dengan baik.

Faktor Penghambat Keberhasilan

- a. Kurangnya Jumlah SDM dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Kurangnya adanya penghargaan atas kerja keras
- c. Kurangnya pengembangan atas keterampilan pegawai

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

3.2.1. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemda

Tabel 3.2.1. Capaian Kinerja SKPD Terhadap Capaian Sasaran Pemda

NO	Sasaran PEMDA / Indikator	Target	Realisasi	Sasaran SKPD / Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan			
	Meningkatnya sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM	100	100	Meningkatnya sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM	100	100	100
	Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi	93	93	Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi	93	93	100
2.	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik			Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	92	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	92	100
3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan			Meningkatnya kualitas koperasi			
	PDRB Sektor Industri Pengolahan	50	50	prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	50	50	100
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan			Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro			
	PDRB Sektor Industri Pengolahan	12.44	12.44	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro	12.44	12.44	100
5.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan			Meningkatkan Kemandirian,Berdaya saing, Kualitas Produksi dan Digitalisasi UMKM			
	PDRB Sektor Industri Pengolahan	10	10	Pertumbuhan rata-rata nilai omset atau nilai produksi Usaha Mikro	10	10	100
6.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih			Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran			
	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	90	90	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel	90	90	100

Penjelasan dari tabel 3.2.1 sebagai berikut :

1. Untuk sasaran pemda Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan

dengan indikator :

- a. Meningkatnya sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM memiliki target 100% dengan realisasi 100%.
- b. Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi memiliki target 93% dan realisasinya 93%.

Sedangkan untuk sasaran SKPD Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan indikator :

- a. Meningkatnya sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM memiliki target 100% dengan realisasi 100%.
- b. Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi memiliki target 93% dan realisasinya 93%. Dengan capaian 100%.

2. Untuk sasaran pemda Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 92 poin dan realisasinya 92 poin.

Sedangkan untuk sasaran SKPD Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 92 poin dengan realisasi 92 point dan capaiannya 100%

3. Untuk sasaran pemda Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan indikator PDRB Sektor Industri Pengolahan dengan target 50% dan realisasinya 50%.

Sedangkan untuk sasaran SKPD Meningkatnya kualitas koperasi dengan indikator prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %) dengan target 50% realisasinya 50% dengan capaian 100%.

4. Untuk sasaran pemda Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan indikator PDRB Sektor Industri Pengolahan dengan target 12.44 dan realisasinya 12.44.

Sedangkan untuk sasaran SKPD Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro dengan indikator Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omzet/ Produksi Usaha Mikro target 12.44, realisasinya 12.44 dengan capaian 100%.

5. Untuk sasaran pemda Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan indikator PDRB Sektor Industri Pengolahan dengan target 10%, realisasi 10%.

Sedangkan untuk sasaran SKPD Meningkatkan Kemandirian, Berdaya saing, Kualitas Produksi dan Digitalisasi UMKM target 10% realisasi 10% dengan

capaian 100%.

- 6. Untuk sasaran pemda Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dengan indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah target 90% realisasinya 90%.

Sedangkan untuk sasaran SKPD Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel dengan target 90%, realisasi 90% dengan capaian 100%.

3.3 Efisiensi Anggaran

Tabel 3.3.1. Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Meningkatnya kualitas koperasi	prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	50	50	100	975.824.972	975.421.417	99.96	403.555
2	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro	12.44	12.44	100	2.139.192.260	2.122.046.277	99.20	17.145.983
3	Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel	90	90	100	3.682.964.140	3.386.212.325	91,94	296.751.815

Penjelasan dari tabel diatas ialah :

- 1. Sasaran dari Meningkatkan koperasi yang sehat dan mandiri yakni Meningkatnya kualitas koperasi dengan indikator kinerja prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5%) pada tahun 2024 memiliki target Anggaran sebesar Rp.975.824.972 dengan realisasi sebesar Rp.975.421.417 atau penyerapan anggaran sebesar 99.96% atau memiliki tingkat efisiensi sebesar Rp.403.555 atau 0.04%.
- 2. Sasaran dari Terwujudnya Peningkatan Daya Saing di Tingkat Provinsi Jawa Barat (Regional Market Share) yakni Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro dengan indikator kinerja Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro pada tahun 2024 memiliki target anggaran sebesar Rp.2.139.192.260 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.122.046.277 penyerapan anggaran sebesar 99.20% atau memiliki tingkat efisiensi sebesar Rp. 17.145.983 atau 0.8%.

3. Sasaran dari Mewujudkan Tata Kelola Perkantoran Yang Efektif dan Efisien yakni Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran dengan indikator kinerja Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel pada tahun 2024 memiliki target anggaran sebesar Rp3.682.964.140 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.386.212.325 penyerapan anggaran sebesar 91.94% atau memiliki tingkat efesiensi sebesar Rp. 296.751.815 atau 8.06%.

3.4 Inovasi

Dalam mencapai sasaran kegiatan yang diharapkan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon juga telah melakukan inovasi. Adanya inovasi ini dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas. Sedangkan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon diantaranya :

1. Business Development Services (BDS)
2. GALERI Caruban
3. UMKM Award

3.5 Lintas Sektor

Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran organisasi yang diharapkan selain melakukan inovasi juga didukung oleh kolaborasi lintas sektor. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor tersebut sasaran dapat dicapai lebih optimal sehingga dapat mewujudkan pertanggungjawaban yang terpandu dan komprehensif. Lintas sektor yang dilakukan oleh Dinas:

1. Dekopinda
2. Dinas Koperasi dan UKM dan Perindustrian Kota Surakarta
3. Kementerian Koperasi Republik Indonesia
4. CSR (corporate social responsibility)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

LAKIP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia **Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 dan analisa hasil capaian kinerja, maka diperoleh gambaran tentang pencapaian sasaran Strategis dari pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan public 92 Poin
- 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan 100 Prosen
- 3) Meningkatnya kualitas koperasi 50 Prosen
- 4) Meningkatnya kapasitas usaha dan produktivitas usaha mikro 12,44 Prosen
- 5) Meningkatnya Kemandirian, berdaya saing, kualitas produksi dan digitalisasi UMKM 10 Prosen
- 6) Terpenuhinya dukungan tata kelola perkantoran 90 Prosen

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Berdasarkan permasalahan yang timbul dari berbagai pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2024 dibawah ini merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- 1) Menyusun agenda kegiatan dengan lebih cermat, dan meningkatkan

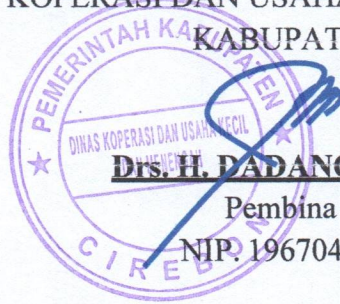
komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro.

- 2) Meningkatkan pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Ukm
- 3) Meningkatkan fasilitasi pemasaran dan e-katalog
- 4) Dilakukannya sosialisasi tentang perkoperasian untuk meningkatkan minat masyarakat dan pengusaha mikro untuk dapat bergabung dalam wadah koperasi.
- 5) Adanya pembinaan yang berkelanjutan untuk dapat mengaktifkan kembali kegiatan berkoperasi sebagai bentuk korporasi bagi anggotanya sehingga dapat bersaing dengan bentuk usaha lainnya.

Sumber, 10 Februari 2025

KEPALA DINAS

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON,



Dis. H. DADANG SUHENDRA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670410 199301 1 001

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag
Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2024

Pihak Kesatu,

✓ Pihak Kedua,


Drs. H. IMRON, M.Ag



Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
NIP. 19670410 199301 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3	Meningkatkan koperasi yang sehat dan mandiri	Rasio Koperasi yang sehat dan mandiri		Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	80 Prosen
2.3.01	Meningkatnya kualitas koperasi	persentase koperasi yang meningkat tata kelola berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan positif dan anggarannya 5 %)		Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	50 Prosen
2.4	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing di Tingkat Provinsi Jawa Barat (Regional Market Share)	Proporsi pangsa pasar Usaha Mikro Kabupaten Cirebon di Tingkat Regional		Kumulatif	Meningkat	Bidang Usaha Mikro	12,44 Prosen
2.4.01	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omzet/Produksi Usaha Mikro		Kumulatif	Meningkat	Bidang Usaha Mikro	12,44 Prosen
2.6	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Tertib Administrasi, Tertib Pertanggungjawaban dan Tertib Keuangan		Non Kumulatif	Meningkat	Sekretariat	92 Prosen
2.6.01	Terperkuatnya Dukungan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel		Kumulatif	Meningkat	Sekretariat	90 Prosen

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(3)	(2)	(3)	(4)
2.3.01.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	16.781.900,00	Sumber Dana: DTU-DBH
2.3.01.04	PROGRAM PENJAJAN KESEHATAN ESPUSP KOPERASI	173.086.616,00	Sumber Dana: DTU-DBH
2.3.01.05	PROGRAM PENDORONG DAN LATIHAN PEMERIKSAAN	415.721.004,00	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DBH
2.3.01.06	PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	138.209.852,00	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DBH
2.4.01.07	PROGRAM PEMERIKSAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA RUMAH (UMKM)	370.353.660,00	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DBH,DTU-DBH
2.4.01.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	871.340.000,00	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DBH, Pk Reklame
2.6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/CIRIBON	3.828.648.140,00	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DBH,BPHTB, DTU-DBH, Pk Pen Jn,DTU-DAL, PAD,DTU-DBH,DTU-DBH, Pk Reklame
J U M L A H		5.614.743.172,00	

Pihak Kedua
BUPATI CIREBON.


Drs. H. IMRON, M.Ag

Sumber, Januari 2024
Pihak Kesatu
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.


Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Pemerintah Kabupaten Cirebon
NIP. 19670410 199301 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : WAHYU MIJAYA
Jabatan : Pj. BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Mei 2024

Pihak Kedua,

WAHYU MIJAYA

Pihak Kesatu,



Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.	Meningkatkan koperasi yang sehat dan mandiri	Rasio Koperasi yang sehat dan mandiri	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT / Jumlah Koperasi yang Aktif x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	80 Prosen	80 Prosen
2.3.01.	Meningkatnya kualitas koperasi	persentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT/ Jumlah Koperasi yang Aktif x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	50 Prosen	50 Prosen
2.4.	Terwujudnya Peningkatan Daya Saling di Tingkat Provinsi Jawa Barat (Regional Market Share)	Proporsi pangsa pasar Usaha Mikro Kabupaten Cirebon di Tingkat Regional	Jumlah umkm yang terdapat di galeri caruban / Jumlah total umkm yang ada x 100%	Kumulatif	Meningkat	Bidang Usaha Mikro	12,44 Prosen	12,44 Prosen
2.4.01.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omzet/ Produk Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang naik omzetnya (ditahun berjalan-jumlah um yang naik omzetnya ditahun lalu) / jumlah um yang naik omzetnya ditahun lalu x 100%	Kumulatif	Meningkat	Bidang Usaha Mikro	12,44 Prosen	12,44 Prosen
2.6.	Mewujudkan Tata Kelola Perkantoran Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Tertib Administrasi, Tertib Pertanggungjawaban dan Tertib Keuangan	Jumlah Pelaporan Administrasi, pertanggungjawaban dan keuangan yang dibuat / jumlah target Pelaporan Administrasi, pertanggungjawaban dan keuangan x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Sekretariat	92 poin	92 poin
2.6.01.	Terpenulainya Dukungan Tata Kelola Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel	Jumlah dukungan tata kelola yang dilaksanakan / jumlah target dukungan tata kelola yang berlaku x 100%	Kumulatif	Meningkat	Sekretariat	90 Prosen	90 Prosen

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.3.01.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	16.781.900,00	16.781.900,00	Sumber Dana:
2.3.01.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	173.086.616,00	173.086.616,00	Sumber Dana:
2.3.01.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	415.721.004,00	647.746.604,00	Sumber Dana:
2.3.01.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	138.209.852,00	138.209.852,00	Sumber Dana:
2.4.01.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	370.953.660,00	482.104.460,00	Sumber Dana:
2.4.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	871.340.000,00	1.756.343.000,00	Sumber Dana:
2.6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.628.648.140,00	3.628.648.140,00	Sumber Dana:
J U M L A H		5.614.741.172,00	6.842.920.572,00	

Pihak Kedua
PJ. BUPATI CIREBON.


WAHYU MIJAYA

Sumber: Mei 2024
Pihak Ketiga
Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.




Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Pengguna Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

Misi :
1. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah
2. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas sumber daya manusia daerah

Tujuan :
1. Menurunkan angka pengangguran
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan yang inklusif dan berkeadilan
3. Meningkatkan koperasi yang sehat dan mandiri
4. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing di Tingkat Provinsi Jawa Barat (Regional Market Share)
5. Terwujudnya Kemandirian, Berdaya Saing dan Digitalisasi UMK
6. Mewujudkan Tata Kelola Perkantoran Yang Efektif dan Efisien

Dasar :
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya kualitas koperasi
4. Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro
5. Meningkatkan Kemandirian, Berdaya saing, Kualitas Produksi dan Digitalisasi UMK
6. Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran

Program :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan Union

Indikator Program :
1. Persentase Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima
2. Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota
3. Persentase koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota
4. Persentase Koperasi Sehat
5. Persentase pengurus, pengawas, manajer dan pengelola koperasi yang bersertifikat kompetensi
6. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian
7. Laju perkembangan usaha produktif koperasi
8. Meningkatnya produktivitas koperasi
9. Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wiraswasti

Regulasi :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5. Administrasi Union Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang NEEK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
10. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
11. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
12. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
13. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
14. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
15. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perilaku, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

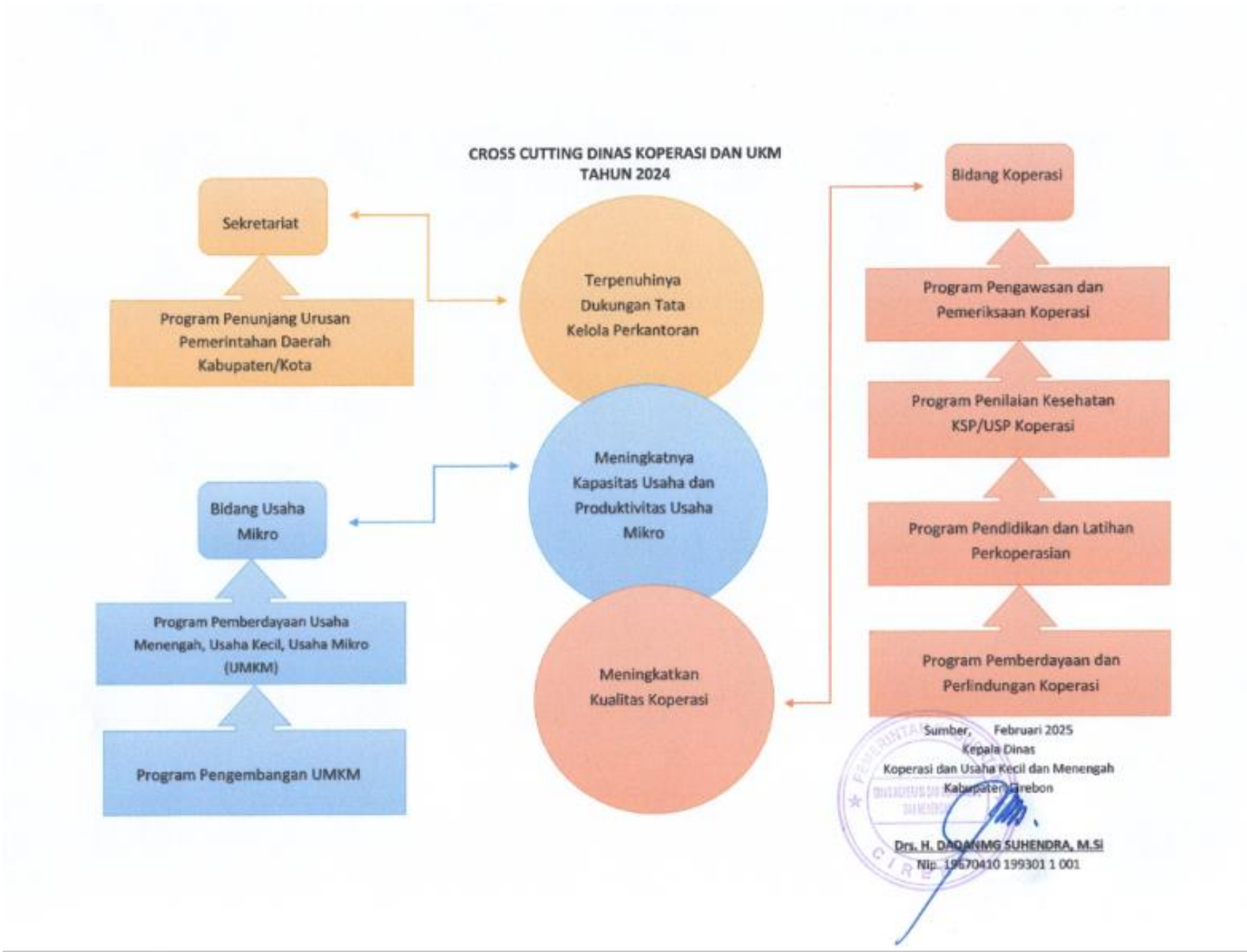
Sub Regulasi :
1. Penyusunan Dokumen Pemencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penatahan RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12. Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perundang-undangan
13. Penyediaan Bahan/Material
14. Fasilitas Rutin/Tameng
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
21. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Keseluruhan Kabupaten/Kota
22. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
23. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
24. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25. Fasilitas Kemudahan Perilaku Usaha Mikro
26. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
27. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
28. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

Anggaran :	
1.	50.463.200
2.	7.328.500
3.	9.927.000
4.	1.386.000
5.	2.912.397.000
6.	44.149.000
7.	7.113.900
8.	8.670.000
9.	79.955.000
10.	2.386.800
11.	20.091.500
12.	50.244.000
13.	95.349.100
14.	16.000.000
15.	95.514.000
16.	47.691.340
17.	31.729.000
18.	99.999.100
19.	260.026.700
20.	16.781.900
21.	173.086.616
22.	647.746.604
23.	138.209.832
24.	158.532.900
25.	28.319.300
26.	156.203.100
27.	44.002.300
28.	95.046.860
29.	1.756.343.000

Sumber, Februari 2025
Kepala Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cirebon

Drs. H. DADANG SUHENDRAM M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001





1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 92 Poin
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan 100 Prosen
3. Meningkatnya kualitas koperasi 50 Prosen
4. Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro 12.44 Prosen
5. Meningkatkan Kemandirian, Berdaya saing, Kualitas Produksi dan Digitalisasi UMKM 10 Prosen
6. Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran 90 Prosen

[illegible]

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Alokasi Periode Rencana PD)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana s.d Rencm Tht Lalu (n-1)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Rencm PD Tht berjalan (Tahun n-1) yang direvisi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Rencm PD yang direvisi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PD s.d Tht 2024 (Alokasi Tht Pelaksanaan Rencana Rencm PD Tht 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Rencm PD s.d Tht 2024 (%)	Ind. Kerja yang terdampak			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
00.01.2.01.0007		Survei Energi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Energi Perangkat Daerah (Tahun: Laporan - Komunitas)	2	17.000.000	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
00.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Tahun: Rencm - Rencm)	6	5.000.250.000	0	6	2.000.000.000	0	620.225.324	2	1.380.344.307	2	1.995.120.427	6	2.552.617.124	6	2.552.617.124	0	11.414.794.089	0	100	0
00.01.2.02.0001		Penyediaan Bantuan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Tunjangan ASN (Tahun: Orang-orang - Rencm Komunitas)	18	5.000.000.000	0	18	2.704.400.000	11	913.125.534	11	1.348.990.007	11	1.962.001.727	11	2.502.124.674	11	2.502.124.674	11	2.502.124.674	61,11	56	0
00.01.2.02.0005		Kendaraan dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Rencm SAKD dan Laporan Rencm Koordinasi Pemenuhan Laporan Keuangan Rencm SAKD (Tahun: Laporan - Komunitas)	1	40.000.000	0	1	44.149.000	0	9.100.000	0,50	19.347.000	0,50	29.000.000	1	42.979.000	1	42.979.000	1	42.979.000	100	95,51	0
00.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Pengadaan Pemerintah	Jumlah Dokumen Rencm Pengadaan Pemerintah dan Peralatan Pemerintah (Tahun: Dokumen - Komunitas)	1	1.000.000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.0007		Kendaraan dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Rencm SAKD dan Laporan Rencm Koordinasi Pemenuhan Laporan Keuangan Rencm SAKD (Tahun: Laporan - Komunitas)	2	10.250.000	0	2	7.115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.0008		Pengelolaan Barang Milik Daerah SAKD	Jumlah Dokumen Anggaran Barang Milik Daerah SAKD (Tahun: Dokumen - Komunitas)	1	1.000.000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.0009		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang Terakumulasi yang Baik (Tahun: Laporan - Komunitas)	30	10.500.000	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.0010		Pengelolaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan yang Baik (Tahun: Peralatan - Komunitas)	2	10.500.000	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.0011		Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah Orang yang menerima Peralatan dan Peralatan Kantor (Tahun: Orang - Komunitas)	20	1.000.000	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.0012		Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah Orang yang menerima Peralatan dan Peralatan Kantor (Tahun: Orang - Komunitas)	20	1.000.000	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.0013		Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah Orang yang menerima Peralatan dan Peralatan Kantor (Tahun: Orang - Komunitas)	20	1.000.000	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.0014		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang Terakumulasi yang Baik (Tahun: Laporan - Komunitas)	30	10.500.000	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.0015		Pengelolaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan yang Baik (Tahun: Peralatan - Komunitas)	2	10.500.000	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.0016		Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah Orang yang menerima Peralatan dan Peralatan Kantor (Tahun: Orang - Komunitas)	20	1.000.000	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.0017		Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah Orang yang menerima Peralatan dan Peralatan Kantor (Tahun: Orang - Komunitas)	20	1.000.000	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.0018		Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah Orang yang menerima Peralatan dan Peralatan Kantor (Tahun: Orang - Komunitas)	20	1.000.000	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.0019		Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah Orang yang menerima Peralatan dan Peralatan Kantor (Tahun: Orang - Komunitas)	20	1.000.000	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00.01.2.02.0020		Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah Orang yang menerima Peralatan dan Peralatan Kantor (Tahun: Orang - Komunitas)	20	1.000.000	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Rencana Peringkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (AMN Periode Rencana PD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana s.d. Akhir Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renc PD Tht berjalan (Tahun n-1) yang direvisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renc PD yang direvisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PD s.d. Thd 2024 (Pencapaian Renc PD Thd 2024)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD s.d. Thd 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
3.17.03.2.03		Pembelian dan Pembuatan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kasi Raperasi Simpan Ragan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pembelian dan Usaha Simpan Ragan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Satuan: Bil)	11	200.000.000	20	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.17.03.2.03.0001		Tenahat Pemenuhan dan Usaha Pembuatan Kantor Kasi Raperasi Simpan Ragan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kasi Raperasi Simpan Ragan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Satuan: Unit Skala - Non Kumulatif)	6	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG KOPERASI			
3.17.03	Hasil/Outputnya sesuai laporan	PROGRAM PENGUSAHA DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Perencanaan pengendalian dan pemantauan yang dilakukan untuk kegiatan dengan wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Program - Non Kumulatif Monev/audit	40	9.750.000.000	40	47.963.200	40	18.761.900	7	0	17	0	40	18.761.900	40	18.761.900	40	18.761.900	40	18.761.900	40	10.588.897	100	2,57	BIDANG KOPERASI
3.17.03.2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Ragan/Unit Simpan Ragan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Ragan/Unit Simpan Ragan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Satuan: Bilangan Bulanan	4	3.600.000.000	3	0	1	14.761.900	0	0	0	0	0	14.761.900	1	14.761.900	1	14.761.900	1	14.761.900	1	104.951.897	25	3,25	
3.17.03.2.01.0001		Pengaturan Tata Letak dan Rancangan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diberikan Pengaturan Tata Letak dan Rancangan Koperasi, Satuan: Unit Skala - Kumulatif	60	800.000.000	0	0	60	18.761.900	0	0	0	0	0	18.761.900	60	18.761.900	60	18.761.900	60	18.761.900	60	18.761.900	100	3,50	BIDANG KOPERASI
3.17.03.2.01.0004		Pertemuan Proses Perencanaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Perencanaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota, Satuan: Unit Skala - Non Kumulatif	60	1.700.000.000	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG KOPERASI		
3.17.04	Hasil/Outputnya sesuai laporan	PROGRAM PENJAJAN KEBERATAN KSP/KSP KOPERASI	Perencanaan Koperasi Simpan Ragan, Satuan: Program - Non Kumulatif Monev/audit	10	1.809.733.000	10	0	20	0	2	0	0	0	0	1	20	0	20	0	20	0	20	114.031.900	100	1,00	
			Perencanaan Koperasi KSP/KSP yang direalisasikan untuk kegiatan dengan wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Satuan: Program - Kumulatif Monev/audit	13	3.400.000.000	17	144.591.000	19	173.084.418	4	0	5	0	19	172.794.251	19	172.794.251	19	172.794.251	19	172.794.251	19	312.177.251	25,65	0,48	BIDANG KOPERASI
3.17.04.2.01		Pembelian Fasilitas Koperasi Simpan Ragan/Unit Simpan Ragan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Koperasi Simpan Ragan/Unit Simpan Ragan Koperasi hasil pembelian fasilitas yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Satuan: Program	19	1.700.000.000	17	0	19	173.084.418	0	0	0	0	0	0	19	172.794.251	19	172.794.251	19	172.794.251	17	522.746.434	89,47	10,75	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Rencana Penetapan Anggaran (PA) pada Tahun 2024 (Alokasi Pokok Rekening PA)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana PA s.d. (s.d.)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana PA Tahun Berjalan (Tahun s.d.) yang direalisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PA s.d. (s.d.)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PA s.d. (s.d.)		Unit Kerja Penanggung Jawab					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
																									K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
2.17.04.2.01.0001		Pemetaan Perilaku Kewirausahaan Kader (SPUP) Kabupaten Karangasem	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Terakreditasi Perilaku Kewirausahaan (Satuan: Unit Usaha Non Kumulatif)	40	1.760.000.000		0	40	173.086.618	0	0	0	0	40	173.086.251	40	172.786.251	40	172.786.251	40	172.786.251	100	100	0	0	0	BIDANG EKSPERAS
2.17.05	Meningkatnya kualitas koperasi	PROGRAM PEMBIDAIAN DAN LATIHAN PENGOPERASIAN	Pembinaan pengurus, pengurus, manajer dan pengurus koperasi yang bermanfaat kompetensi, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Menengah)	40	5.000.000	35	0	40	0	0	0	0	0	40	0	40	0	40	0	40	0	100	0				
			Pembinaan koperasi yang mengikuti pelatihan Pengoperasian (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Menengah)	60	5.587.429.475	50	0	60	647.746.904	13	88.325.753	18	325.848.753	45	420.625.059	60	647.644.059	60	647.644.059	60	647.644.059	100	100	0	0	0	BIDANG EKSPERAS
2.17.05.2.01		Pendidikan dan Latihan Pengoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan pengurus, pengurus, manajer dan pengurus koperasi yang bermanfaat kompetensi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota, (Satuan: Prosen)	55.17	2.000.000.000	41.38	0	55.17	647.746.904	0	88.315.753	0	325.848.753	0	420.625.059	55.17	647.644.059	55.17	647.644.059	41.38	2.555.569.059	75	127.78				
2.17.05.2.01.0001		Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Perilaku Kewirausahaan serta Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Penguasaan Perilaku Kewirausahaan (Satuan: Orang - Non Kumulatif)	200	2.000.000.000		0	200	647.746.904	40	88.315.753	140	325.848.753	180	420.625.059	200	647.644.059	200	647.644.059	200	647.644.059	100	100	0	0	0	BIDANG EKSPERAS
2.17.06	Meningkatnya kualitas koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Lula perkembangan usaha (satuan) koperasi (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Menengah)	40	10.000.000	35	0	40	0	0	0	0	0	40	0	40	0	40	0	40	0	100	0	0	0	0	
			Meningkatnya produktivitas koperasi (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Menengah)	5.87	1.941.276.350	3.51	0	5.87	138.209.852	0	4.870.753	0	9.904.753	1.29	133.134.607	1.27	138.208.607	1.27	138.208.607	1.27	138.208.607	100	100	0	0	0	BIDANG EKSPERAS
2.17.06.2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan koperasi kecil, Perimbangan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, (Satuan: Desentral)	4	580.000.000	1	0	1	138.209.852	0	4.870.753	0	9.904.753	0	133.134.607	1	138.208.607	1	138.208.607	1	138.208.607	100	100	0	0	0	
2.17.06.2.01.0005		Peningkatan Produktivitas, Bilai Tambak, Area Pekar, Area Perikanan, Penguasaan Keanggotaan, Penguasaan Manajemen, Koordinasi, dan Berkomunikasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Berbilai Tambak, Berbilai Area Pekar, Area Perikanan, Penguasaan Keanggotaan, Penguasaan Manajemen, Koordinasi, dan Berkomunikasi Usaha (Satuan: Unit Usaha - Non Kumulatif)	35	580.000.000		0	35	138.209.852	0	4.870.753	0	9.904.753	35	133.134.607	35	138.208.607	35	138.208.607	35	138.208.607	100	100	0	0	0	BIDANG EKSPERAS
2.17.07	Meningkatnya Capaian Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MUKOM, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pembinaan usaha Mikro Yang Menduk (Satuan: Prosen - Kumulatif Menengah)	14.13	6.180.289.700	4	0	5	0	1.00	0	1.00	0	2.00	0	5	0	5	0	5	0	100	100	0	0	0	
			Batu perantara usaha mikro yang berakumulasi, (Satuan: Prosen - Kumulatif Menengah)	18.73	10.220.000.000	2.25	0	18.73	482.104.488	1.29	25.265.688	1.83	138.966.309	4	251.860.580	5	484.051.500	5	484.051.500	5	484.051.500	100	100	0	0	0	BIDANG USAHA MIKRO

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Rasio Penyerapan Anggaran (RP) pada Tahun 2024 (Jalur Periode Realisasi RP)		Realisasi Capaian Kinerja Rasio s.d Rasio Tm Laju (s.d)		Target Kinerja dan Anggaran Rasio PD Tm Berjalan (Tahun n-1) yang direalisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rasio PD yang direalisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rasio PD s.d Tm 2024 (Jalur Tm Pelaksanaan Rasio PD Tm 2024)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rasio PD s.d Tm 2024 (%)		Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)																	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp															
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																	
1.17.07.2.01		Pembentukan Usaha Mikro yang Didukung melalui Pendataan, Sertifikasi, Pembiayaan, Penguatan Kemampuan dan Koordinasi dengan Para Pihak yang Berkepentingan	Persentase Usaha Mikro yang Mendapat Pendataan (SD), Sertifikasi (s), Pembiayaan (s), dan Penguatan kemampuan (s) yang memperoleh pendataan, sertifikasi, produk usaha, (Saluran Finansial)	14	5.370.000.000	1	0	10	482.124.400	0	25.205.000	0	101.000.000	0	231.000.000	10	494.073.300	10	400.073.300	10	3.906.500.000	41,67	52,75																		
1.17.07.2.01.0002		Pembiayaan Mikro Pembiayaan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang Terah Mendapatkan Pembiayaan Usaha Mikro, (Saluran Unit Usaha Non Kumulatif)	200	270.000.000	0	200	130.100.000	0	0	100	00.025.700	100	100.000.700	200	130.100.000	200	130.100.000	200	130.100.000	100	50,50			50,50																
1.17.07.2.01.0003		Pelatihan Kapasitas Pembiayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terah Mendapatkan Pelatihan (Saluran Unit Usaha Non Kumulatif)	250	400.000.000	0	250	20.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	20.000.000	250	20.000.000	250	20.000.000	250	20.000.000	100	1,13			50,50																
1.17.07.2.01.0004		Pembiayaan Asuransi Risiko dan Pengembalian Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang Terah Mendapatkan Asuransi dan Pengembalian Usaha Mikro, (Saluran Unit Usaha Non Kumulatif)	250	1.000.000.000	0	250	100.000.000	0	0	0	0	100	47.400.700	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	100	9,75			50,50																
1.17.07.2.01.0005		Kordinasi dan Koordinasi dengan Para Pihak yang Berkepentingan dan Pembiayaan Usaha Mikro	Jumlah SKM yang Terah Mendapatkan Koordinasi dan Sertifikasi dengan Para Pihak yang Berkepentingan dan Pembiayaan Usaha Mikro, (Saluran Unit Usaha Non Kumulatif)	150	100.000.000	0	150	44.000.000	0	3.170.000	0	10.000.000	50	25.000.000	150	43.000.000	150	43.000.000	150	43.000.000	100	43,94			50,50																
1.17.07.2.01.0014		Pembiayaan Baku Daya Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terah Mendapatkan Pembiayaan Baku Daya Usaha Mikro, (Saluran Unit Usaha Non Kumulatif)	2000	2.000.000.000	0	2000	95.000.000	0	0.000.000	0	10.000.000	0	23.000.000	2000	77.000.000	2000	77.000.000	2000	77.000.000	100	3,10			50,50																
1.17.08		Manajemen Risiko dan Pembiayaan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang Mendapatkan Risiko dan Pembiayaan Usaha Mikro, (Saluran Finansial - Kumulatif)	4	31.070.000.000	3,50	1.000.760.700	1,00	1.007.000.000	0,25	25.000.000	0,25	174.000.000	1,25	694.000.000	1,50	1.007.000.000	1,50	1.007.000.000	1,50	4.007.000.000	87,50	12,25			50,50															
1.17.08.2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Pendekatan Pembiayaan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro yang Mendapatkan Pembiayaan Usaha Mikro, (Saluran Finansial - Kumulatif)	2000	1.455.000.000	800	0	800	1.457.000.000	0	25.000.000	0	174.000.000	0	694.000.000	0	1.007.000.000	0	1.007.000.000	0	4.007.000.000	0	50,45			50,50															
1.17.08.2.01.0005		Produk dan Pengembalian Pembiayaan, Sumber Daya Manusia, serta Sosial dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang Mendapatkan Produk dan Pengembalian, Pembiayaan, Sumber Daya Manusia, Serta Sosial dan Teknologi, (Saluran Unit Usaha Non Kumulatif)	1200	1.455.000.000	0	1200	1.457.000.000	0	25.000.000	200	174.000.000	1200	694.000.000	1200	1.007.000.000	1200	1.007.000.000	1200	1.007.000.000	100	12,24			50,50																
Rata-rata capaian kinerja (%)																								8,35	11,60	17,77	52,34	36,49	55,55	67,03	65,38										
Prediksi kinerja																								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Tengah	Sangat Tinggi										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rasio Peringkat Daerah berikutnya :																																									

Sumber, 09 Januari 2025
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah,



Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

BERITA CARA TINDAKLANJUT HASIL REVIU LAKIP
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pada hari ini Senin tanggal 11 Nopember 2024, telah dilaksanakan tindaklanjuti hasil revidu LAKIP tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Temuan : 8

NO.	REKOMENDASI TEMUAN	TINDAKLANJUT OPD	PENYELESAIAN		DOKUMEN PENDUKUNG	
			SELESAI	BELUM SELESAI	ADA	TIDAK ADA
	PERENCANAAN KINERJA					
1.	Membuat laporan review Renstra secara berkala per Triwulan.	Laporan review Renstra Triwulan I-IV Tahun 2023	√		√	
2.	Membuat notulen rapat yang dipimpin dan di tandatangani oleh Kepala Dinas terkait pencapaian kinerja termasuk permasalahan yang dihadapi beserta solusi pemecahannya.	Notulen rapat hasil review penilaian kinerja dinas yang dipimpin dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Cirebon Tahun 2023	√		√	
	PENGUKURAN KINERJA					
3.	Membuat SOP pengumpulan data kinerja.	Dokumen SOP pengumpulan dan pengukuran Data Kinerja berupa Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disertai dengan flowchart	√		√	
4.	Melampirkan dokumen penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional berdasarkan pengukuran capaian kinerja.	Melengkapi bukti dukung berupa dokumen penempatan / penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional berdasarkan pengukuran capaian kinerja Tahun 2023	√		√	
	PELAPORAN KINERJA					
5.	Melengkapi Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Laporan Informasi perbandingan capaian kinerja antar tahun	√		√	

NO.	REKOMENDASI TEMUAN	TINDAKLANJUT OPD	PENYELESAIAN		DOKUMEN PENDUKUNG	
			SELESAI	BELUM SELESAI	ADA	TIDAK ADA
6.	Dokumen Laporan Kinerja agar menyajikan data perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/provinsi (Benchmark Kinerja).	Data perbandingan realisasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Cirebon dengan realiasi kinerja di level provinsi (Benchmark Kinerja) Tahun 2023	√		√	
7.	Melengkapi dengan hasil rapat/notulen atas pencapaian kinerja yang di tandatangani oleh Kepala Dinas.	Notulen review pencapaian kinerja Tahun 2023 yang telah di tandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Cirebon	√		√	
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL						
8.	Agar membuat Notulen/Laporan Hasil Evaluasi Internal LKIP.	Notulen Rapat Evaluasi Internal Lakip Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Cirebon Tahun 2023	√		√	

Sumber, 11 Nopember 2024

a.n. TIM TINDAKLANJUT


TEMI HARTONO, ST.
NIP. 197705112010011007

An. Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cirebon
Sekretaris


ASEP SUTANDI, SE., M.Si
NIP. 19730513 199803 1 004

Catatan :

Bukti Tindakanlanjutan diarsipkan oleh tim tindakanlanjutan dalam bentuk softcopy



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email inspektorat@cirebonkab.go.id

SUMBER

**CATATAN HASIL REVIU
ATAS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2023 PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11.1/675-Sekr tanggal 15 Februari 2024 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

A. Waktu Pelaksanaan Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai dari tanggal 4 s/d 26 Maret 2024.

B. Penilaian

Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, diperoleh hasil, sbb :

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nilai Angka Evaluasi AKIP : 71,90
Kategori Predikat : BB (Sangat Baik)
Dengan Catatan sebagai berikut :

A.	PERENCANAAN KINERJA
1.	Dokumen Renstra belum direviu secara berkala
2.	Hasil pencapaian kinerja termasuk permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahannya belum dilengkapi dengan dokumen notulen rapat
B.	PENGUKURAN KINERJA
3.	SOP pengumpulan data kinerja belum ada
4.	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional
C.	PELAPORAN KINERJA
5.	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
6.	Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/provinsi (Benchmark Kinerja).
7.	Keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja belum dilengkapi dengan dokumen notulen rapat
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
8.	Belum adanya evaluasi terhadap dokumen LKIP oleh internal unit kerja

C. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 sebagaimana tercantum di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, agar :

A.	PERENCANAAN KINERJA
1.	Membuat laporan review Renstra secara berkala per Triwulan
2.	Membuat notulen rapat yang dipimpin dan di tandatangi oleh Kepala Dinas terkait pencapaian kinerja termasuk permasalahan yang dihadapi beserta solusi pemecahannya
B.	PENGUKURAN KINERJA
3.	Membuat SOP pengumpulan data kinerja
4.	Melampirkan dokumen penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional berdasarkan pengukuran capaian kinerja
C.	PELAPORAN KINERJA
5.	Melengkapi Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
6.	Dokumen Laporan Kinerja agar menyajikan data perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/provinsi (Benchmark Kinerja)
7.	Melengkapi dengan hasil rapat/notulen atas pencapaian kinerja yang di tandatangi oleh Kepala Dinas
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
8.	Agar membuat Notulen/Laporan Hasil Evaluasi Internal LKIP

E. Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- Tindaklanjuti hasil evaluasi Akip Tahun 2022 oleh APIP belum ditindaklanjuti sebanyak - temuan.

Demikian Catatan Hasil Reviu (CHR) atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, kiranya menjadi maklum dan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dimaksud.

Sumber, 26 Maret 2024

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cirebon


Drs. H. BADANG SUHENDRA, M.Si
NIP. 19670410 199301 1 001

Wakil Penanggung Jawab


EUIS SITI SONDARI, S.Sos
NIP. 19690206 198903 2 005

Penghargaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

Uraian	Foto Piagam
Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, perihal Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2024 tentang Penerima Tanda Penghargaan atau Tanda Jasa Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024. Diberikan kepada Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, <i>atas Jasa dan Dharmabakti dalam Memajukan Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah.</i> Jakarta Tanggal 29 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh TETEN MASDUKI selaku Menteri Koperasi dan UKM RI.	

**Gedung BDS Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cirebon**



Display produk UKM di Galeri Caruban



UMKM AWARD 2024

